

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dunia dapat menjadi sebuah tantangan bagi sebuah negara. Kondisi perekonomian sering menjadi indikator kualitas sebuah negara. Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator kondisi perekonomian.² Kesiapan dalam mengontrol laju inflasi tidak lepas dari pondasi kebijakan moneter yang dijalankan. Pada dasarnya tujuan dari sebuah negara ialah untuk meningkatkan pendapatannya guna meningkatkan perekonomiannya.

Perekonomian yang stabil adalah perekonomian yang tidak mengalami gejolak perubahan barang. Menurut Eleonora Sofilda dan Parmoko, apabila perekonomian mengalami kenaikan harga yang terus menerus maka akan terjadi inflasi. Inflasi yang deras akan pasti menghancurkan perekonomian, dimana barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian semakin sedikit.³ Mengingat pentingnya pengendalian inflasi bagi ekonomi suatu negara, maka sejak tahun 1990-an berbagai negara mulai menerapkan kebijakan *inflation targetting* yang bertujuan untuk membentuk dan mengarahkan ekspektasi masyarakat (*inflation expectation*) kepada tingkat inflasi yang rendah sebagai target, dan memberikan pedoman

² Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 77

³ Eleonora Sofilda dan parmoko, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Tangerang: In Media, 2014), hal. 7

kepada para pelaku pasar (baik konsumen maupun produsen) dan para pembuat kebijakan untuk ikut mewujudkan target inflasi.⁴

Langkah-langkah Bank Indonesia dalam mencapai inflasi yaitu dengan mentransmisikan kebijakannya melalui beberapa jalur, yaitu jalur suku bunga, kredit, harga aset, neraca pembayaran, nilai tukar dan ekspektasi. Jalur yang paling dengan sektor riil adalah jalur kredit atau pembiayaan perbankan. Stabilitas moneter dan perbankan merupakan dua sisi yang saling berpengaruh. Menurut Anjarsari, keterkaitan antar kebijakan moneter dengan perbankan dapat dilihat dari interaksi bank sentral dengan perbankan dalam melakukan proses perputaran uang yang melibatkan pelaku ekonomi di sektor riil.⁵

Kebijakan moneter adalah upaya penguasa moneter yaitu bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter demi tercapainya tujuan perekonomian.⁶ Menurut Catona Machtra dan Fakhrudin, untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan bank sentral atau otoritas moneter akan berusaha untuk mengatur keseimbangan antara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.⁷

⁴ Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, (Jakarta: FE UI, 2008), hal. 374

⁵ Ida Fitri Anjarsari, *Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Jalur Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2008-2015*, (Yogyakarta: UNY, 2017)

⁶ Bruce Litteboy dan B. John Taylor, *Macroeconomics Third Edition*, (Australia: John Wiley and Sons, 2006), hal. 198

⁷ Catona Machtra dan Fakchrudin, "Analisis Efek Kebijakan Moneter Terhadap Output di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2016, hal. 12, dalam <http://jurnal.unsyiah.ac.id/EKaPI/article/view/5546>, diakses pada 16 Desember 2020

Sektor moneter harus seimbang dengan sektor riil. Jika hal tersebut tidak terjadi maka akan menimbulkan *buble economy* yang tertuju pada krisis ekonomi. Fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa, ketidakseimbangan tersebut dipicu oleh maraknya kegiatan bisnis spekulatif, sehingga dunia terjankit *buble economy*, yakni sebuah perekonomian yang terlihat sangat besar namun tidak berisi apa-apa, dan suatu saat akan meledak dan berakibat pada krisis ekonomi yang besar.

Mekanisme transmisi instrumen kebijakan moneter biasanya terlihat pada dua aktivitas perputaran uang, yaitu transaksi bank sentral dengan perbankan lainya dan transaksi antara perbankan dengan pelaku ekonomi. Pada aktivitas kedua, menggambarkan bahwa bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi adalah interaksi antara perbankan dengan lembaga lainya berupa pengumpulan dana yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada pelaku ekonomi di sektor riil. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional. Bank syariah membawa kemajuan sektor riil melalui produk yang dimiliki, yaitu produk yang diberikan bank syariah untuk pembiayaan produktif dan konsumtif. Salah satu pembiayaan perbankan syariah yang digunakan untuk memajukan sektor riil yaitu *mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan salam,*

Sejak munculnya bank syariah pertama pada tahun 1992, sektor keuangan Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking*

system)⁸. Hal tersebut berarti sistem bank konvensional dan bank syariah dapat berjalan secara beriringan. Namun terdapat perbedaan dalam penerapannya dimana sistem konvensional yang menganut sistem bunga (*interest rate system*) dan sistem syariah yang menganut sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*). Hal itulah yang menjadi latar belakang munculnya transmisi kebijakan moneter ganda.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁹ Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Azhar Abdullah, fungsi ini sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab dana yang berhasil dihimpun akan menentukan pula *volume* dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.¹⁰

Instrumen transmisi kebijakan moneter konvensional menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Suku Bunga Kredit (INT) dan Total Kredit (LOAN).¹¹ Islam melarang transaksi yang mengandung riba. Oleh sebab itu, perlu adanya variabel yang sesuai

⁸ Salahuddin El Ayyubi dkk, "Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Jurnal Al-Muzara'ah Vol 5 No. 2, 2017 hal. 89, dalam <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/20648>, diakses pada 16 Desember 2020

⁹ UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁰ Azhar Abdullah, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Pustaka Utama, 1970), hal. 29

¹¹ *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan Indonesia*, Vol. 14, No.3 (Jakarta: Bank Indonesia.2012), hal.. 299

dengan syariat Islam. Instrumen yang digunakan dalam transmisi kebijakan moneter syariah, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), *Profit and Lost Sharing* (PLS), dan Pembiayaan (FINC)¹². Perbedaan ini membuat kebijakan moneter Indonesia semakin berkembang karena dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi bank syariah untuk mengembangkan usahanya di sektor riil karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Kebijakan moneter syariah di Indonesia menggunakan instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan pemberian imbalan (*fee*) kepada bank syariah yang masih merujuk kepada tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tingkat imbalan (*fee*) berperan sebagai *policy rate*. *Policy rate* ini dapat mempengaruhi pendanaan atau pembiayaan melalui Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang kemudian akan mempengaruhi biaya dana perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya.¹³

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah

Tahun	SBIS (%)	PUAS (%)	FINC (Miliar)
Desember 2013	7.22	6.25	184.122
Desember 2014	6.9	6.3	148.425
Desember 2015	7.1	6.73	154.527
Desember 2016	5,9	6,08	248.007
Desember 2017	5,21	4,31	320.193

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, DSM-BI

¹² *Ibid*, hal. 300

¹³ *Ibid*, hal. 298

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa instrumen SBIS mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 6,9%. Kemudian pada tahun 2015, SBIS mengalami peningkatan sebesar 7,1%. Namun menurut data dari DSM-BI pada tahun 2013 sampai dengan 2015 tingkat bagi hasil pasar uang antarbank syariah (PUAS) justru mengalami peningkatan. Disisi lain, total pembiayaan (FINC) justru mengalami penurunan. Pada tahun 2013, OJK mencatatkan pembiayaan sebesar Rp. 184.122 Miliar. Kemudian pada tahun 2014, mengalami penurunan dengan mencatatkan total pembiayaan sebesar Rp. 148.425 Miliar. Selanjutnya, terjadi kenaikan pada tahun 2015 dengan total pembiayaan sebesar Rp. 154.527 Miliar

Salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah.¹⁴ Regulasi OMS Tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah. Selain itu, transmisi instrumen kebijakan moneter syariah perlu dilaksanakan guna menyeimbangkan laju perekonomian nasional agar kegiatan transaksi terhindar dari praktik *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Operasi Moneter Syariah (OMS) adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Penerbit Kencana, 2017), hal. 211

¹⁵ *Ibid*, hal. 212

Kehadiran perbankan syariah merupakan bentuk dari fungsi lembaga keuangan sebagai media intermediasi. Hal ini berbanding lurus dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1.2

Perkembangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tahun 2014-2019

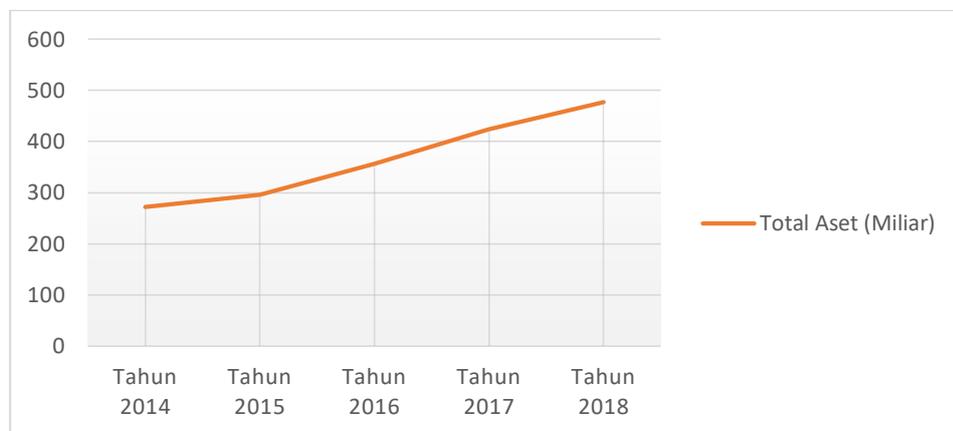
Indikator (Satuan)	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
BUS	12	12	13	13	14
UUS	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875
Jumlah ATM	3.350	3.571	3.127	2.585	2.791

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2014-2018, diolah

Pada tabel diatas, indikator perkembangan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) menunjukkan bahwa, terdapat peningkatan jumlah BUS dimulai pada tahun 2016 dan 2018. Namun sebaliknya, mulai tahun 2016 UUS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah layanan kantor yang disebabkan karena beberapa bank di Indonesia melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah kantor yang kurang berkontribusi.

Ketersediaan modal dapat mempengaruhi produktivitas dari perbankan syariah. Hal ini berkaitan langsung dengan investasi yang ingin dijalankan. Pembiayaan yang tepat sasaran dapat memberikan efektivitas pada layanan walaupun dengan kantor yang minim. Pengaruh dari efektivitas jumlah kantor layanan dengan tetap menjaga layanan prima kepada nasabah dapat dilihat dari total aset yang terus meningkat pada BUS maupun UUS.

Grafik 1.1
Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah Tahun 2014-2018



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2014-2018, diolah

Grafik diatas memperlihatkan bahwa jumlah aset BUS dan UUS. Pada tahun 2014 BUS dan UUS mencatatkan total aset sebesar Rp 272.343 Miliar. Aset tersebut terus bertambah disetiap tahunnya, seperti pada tahun 2015 total aset yang dimiliki sebesar Rp 296.262 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp 356.504 Miliar, tahun 2017 Rp 424.181 Miliar serta tahun 2018 dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana BUS dan UUS mencatatkan aset sebesar Rp 477.327 Miliar. Peningkatan jumlah total aset perbankan syariah di Indonesia tentunya dapat menjadi angin segar dalam menunjang perekonomian nasional. Data diatas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan bank syariah terus meningkat.

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengamati pertumbuhan ekonomi sektor riil adalah *Consumer Price Index* (CPI) atau di Indonesia disebut dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK bermanfaat

untuk mengetahui tingkat kenaikan pendapatan, harga, juga dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi dan tolak ukur besarnya biaya produksi.¹⁶

Tabel 1.3
Data Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen
Januari – Desember Tahun 2017-2018

Bulan	IHK/CPI (2017)	Inflasi (%) (2017)	IHK/CPI (2018)	Inflasi (%) (2018)
Januari	127.94	0.97	132.10	0.62
Februari	128.24	0.23	132.32	0.17
Maret	128.22	-0.02	132.58	0.20
April	128.33	0.09	132.71	0.10
Mei	128.83	0.39	132.99	0.21
Juni	129.72	0.69	133.77	0.59
Juli	130.00	0.22	134.14	0.28
Agustus	129.91	-0.07	134.07	-0.05
September	130.08	0.13	133.83	-0.18
Oktober	130.09	0.01	134.2	0.28
November	130.35	0.2	134.56	0.27
Desember	131.28	0.71	135.39	0.62
Tingkat Inflasi	-	3,61	-	3,13

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa IHK pada bulan Januari-Desember tahun 2017 dan 2018 cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa. Namun sebaliknya, laju inflasi tahun 2018 cenderung lebih kecil daripada tahun 2017. Pada tahun 2017 terjadi lonjakan harga pada tarif dasar listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 kebijakan moneter

¹⁶ Fazhar Sumantri dan Umi Latifah, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Harga Konsumen", Widya Cipta, Vol. 3 No. 1, 2019, hal. 25, dalam <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/download/4638/pdf>, diakses 16 Desember 2020

cukup baik dalam menekan laju inflasi karena terkendalinya harga seluruh indeks kelompok pengeluaran.

Indeks Harga Konsumen (IHK) dan pembiayaan (FINC) perbankan syariah cenderung mengalami kenaikan pada periode yang sama. Disisi lain, instrumen moneter syariah seperti SBIS dan PUAS juga cenderung mengalami kenaikan. Hal ini menarik minat peneliti untuk menganalisis bagaimana pengaruh instrumen kebijakan moneter syariah melalui pembiayaan bank syariah terhadap sektor riil pada jangka panjang maupun jangka pendek.

Menurut Statistik Perbankan Indonesia (SPI), pada tahun 2019 jumlah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia sebesar 110 bank termasuk di dalamnya terdapat bank persero, BUSN devisa, BUSN non-devisa, BPD, dan bank asing. Sedangkan, menurut Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada tahun yang sama jumlah bank syariah yang beroperasi sebesar 34 bank termasuk didalamnya BUS dan UUS. Dilihat dari data tersebut, di Indonesia sendiri sistem keuangan didominasi oleh perbankan konvensional. Oleh sebab itu, penelitian mengenai kontribusi bank syariah di dalam transmisi instrumen moneter syariah melalui jalur pembiayaan pada sektor riil dirasa penting.

Novi Indri Sitepu dalam penelitiannya tentang analisis peran bank syariah, menyatakan bahwa bank syariah dapat ikut serta menjaga kestabilan sistem keuangan domestik, jika peran intermediasi perbankan berdasarkan prinsip syariah dijalankan secara optimal. Namun, perbankan syariah juga

dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional jika dalam aktifitasnya masih meniru bank-bank konvensional.¹⁷

Penelitian Kusumawati tentang analisis pembiayaan sektor konstruksi pada perbankan syariah di Indonesia, mengungkapkan bahwa rasio pembiayaan sektor konstruksi merespon secara negatif ketika terjadi guncangan sebesar satu deviasi pada variabel DPK, SBK, NPF, BSBIS, dan PUAS. Ekspansi pembiayaan perbankan syariah sektor riil dapat meningkatkan pendapatan nasional yang diproksikan melalui IPI.¹⁸

Kajian dari Ascarya yang dipublikasikan dalam Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan Indonesia pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa variabel dalam ekonomi moneter syariah, yaitu SBIS dan PUAS berpengaruh positif terhadap sektor riil. Pada penelitian ini, Ascarya merepresentasikan sektor riil menggunakan *industrial production index* (IPI). Di mana IPI adalah *industrial production index* sebagai proksi pertumbuhan ekonomi atau output.¹⁹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah tentang interaksi variabel moneter pada tahun 2012, menyimpulkan bahwa, variabel SBIS berpengaruh positif terhadap sektor riil (GDP) dalam jangka waktu panjang dan pendek. Penelitian Setiawan dan Karsinah mekanisme transmisi

¹⁷ Novi Indriyani Sitepu, "Peran Bank Syariah Dalam Pengendalian Harga", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 No. 1. 2015, hal. 73, dalam <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6520/5344>, diakses 16 Desember 2020

¹⁸ NN Kusumawati, "Analisis Pembiayaan Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 1, No. 2, 2013, hal. 201, dalam <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19752>, diakses 16 Desember 2020

¹⁹ Ascarya. "Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter...", hal. 297.

kebijakan moneter, menyimpulkan bahwa variabel PUAS dan FINC berpengaruh positif terhadap sektor riil. Sedangkan variabel SBIS berpengaruh negatif terhadap sektor riil.

Dalam Buletin Ekonomi, Moneter, dan Perbankan Indonesia BI, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kestabilan nilai uang sektor riil, dapat menggunakan dua variabel yaitu, *Industrial Production Index* (IPI) dan *Consumer Price Index* (CPI). *Consumer Price Index* di Indonesia disebut dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah perbandingan relatif dari harga suatu paket barang dan jasa pada suatu saat dibandingkan dengan harga-harga barang dan jasa tersebut pada tahun dasar yang diminta oleh konsumen.²⁰ Oleh sebab itu, perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui peran perbankan syariah di dalam transmisi kebijakan moneter syariah yang direpresentasikan dalam *consumer price index* (CPI). Selain itu, untuk mengetahui informasi terbaru, maka diperlukan rentan waktu yang lebih panjang agar dapat menjadi perbandingan pada tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti ingin mengetahui peran perbankan syariah di dalam transmisi instrumen kebijakan moneter syariah terhadap sektor konsumsi. Maka, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Transmisi Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Konsumsi di Indonesia Tahun 2009-2018”**.

²⁰ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanasius, 2004), hal. 201

B. Identifikasi Masalah

1. Untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional, maka bank syariah perlu berkontribusi dalam kebijakan moneter syariah dalam menjaga tingkat indeks harga konsumen (IHK).
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan 6,9%, penurunan ini mengindikasikan bahwa bank syariah sempat mengalami kesulitan dalam penempatan dana di Bank Indonesia.
3. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) pada tahun 2013 tercatat pada 6,25 % , besar kecilnya PUAS dipengaruhi oleh transaksi pasar uang di sektor konsumsi.
4. Pembiayaan (FINC) pada tahun 2014 mengalami penurunan pada angka Rp 148.425 Miliar, maka besar kecilnya pembiayaan dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat.
5. Terdapat pengaruh signifikan antara SBIS, PUAS dan FINC terhadap *consumer price index* (CPI)/(IHK).

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap sektor konsumsi yang direpresentasikan oleh *consumer price index* (CPI) Tahun 2009-2018 ?
2. Apakah Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) berpengaruh terhadap sektor konsumsi yang direpresentasikan oleh *consumer price index* (CPI) Tahun 2009-2018 ?

3. Apakah Pembiayaan (FINC) berpengaruh terhadap sektor konsumsi yang direpresentasikan oleh *consumer price index* (CPI) Tahun 2009-2018 ?
4. Apakah instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Pembiayaan (FINC) efektif diterapkan secara bersama-sama terhadap sektor konsumsi yang direpresentasikan oleh *consumer price index* (CPI) Tahun 2009-2018 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Consumer Price Index* (CPI) Tahun 2009-2018.
2. Untuk menguji pengaruh Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) terhadap *Consumer Price Index* (CPI) Tahun 2009-2018.
3. Untuk menguji pengaruh Pembiayaan (FINC) terhadap *Consumer Price Index* (CPI) Tahun 2009-2018.
4. Untuk menguji efektivitas Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Pembiayaan (FINC) terhadap *Consumer Price Index* (CPI) Tahun 2009-2018.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian terbagi atas dua bagian, yaitu

1. Secara Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berdampak baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional Indonesia melalui jalur pembiayaan pada sektor konsumsi pada tahun 2009-2018.

2. Secara Praktis

a. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui informasi dampak kebijakan moneter Islam terhadap sektor konsumsi di Indonesia.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperdalam pengembangan ilmu ekonomi melalui kebijakan moneter Islam khususnya pembiayaan pada sektor konsumsi.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi tambahan rujukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai kontribusi bank syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional Indonesia melalui jalur pembiayaan.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pada setiap penelitian ruang lingkup dan pembatasan masalah perlu dilakukan. Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan arahan agar terhindar dari pengumpulan data yang tidak diperlukan. Selain itu, hal tersebut perlu dilakukan agar penelitian dapat terfokus.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini berupa variabel-variabel yang diteliti, populasi dan juga sampel yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Penetapan regulasi

kebijakan moneter syariah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah, sehingga periode yang diambil dalam penelitian dimulai dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2018. Pengambilan data *consumer price index* (CPI) diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu www.bps.go.id periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2018. Selain itu, pengambilan data SBIS, PUAS, dan FINC diambil dari laman resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2018.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) yang digunakan adalah instrumen kebijakan moneter syariah, yaitu SBIS, PUAS, dan FINC. Sedangkan variabel terikatnya (Y) yaitu *Consumer Price Index* (CPI) atau disebut Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Pembatasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini meliputi:

- a. Penelitian ini mencangkup peran perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian nasional Indonesia melalui jalur pembiayaan pada sektor konsumsi pada tahun 2009-2018.
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini adalah SBIS, PUAS, dan FINC perbankan syariah terhadap sektor konsumsi yang direpresentasikan oleh *consumer price index* (CPI) atau disebut indeks harga konsumen (IHK).

G. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan istilah-istilah pokok agar mudah dipahami. Penegasan istilah terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Definisi Konseptual

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.²¹
- b. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.²²
- c. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan *finance* (FINC) ialah total pembiayaan bank syariah yang didapat dari Statistik Perbankan Syariah.²⁴
- d. Indeks Harga Konsumsi (IHK) atau *consumer price index* (CPI) adalah mengukur biaya dari “satu keranjang” barang dan jasa konsumen dari waktu ke waktu.²⁵

²¹ Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

²² Peraturan Bank Indonesia No. 17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

²⁴ Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, *Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia*, Vol. 14 No. 3, 2012 hal. 299, dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnalekonomi/documents/0f6046ce2b4f420b9a36ee54fec450f5bempjanuary2012kebijakanmonetergandaascarya.pdf>, diakses 14 desember 2020

²⁵ Mc Eachern, *Ekonomi Makro, Edisi Pertama*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 134

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian yang berjudul “Efektivitas Transmisi Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Konsumsi di Indonesia Tahun 2009-2018” menjelaskan tentang efektivitas instrumen kebijakan moneter syariah melalui variabel SBIS, PUAS, dan FINC (Pembiayaan Syariah) terhadap *consumer price index* (CPI) yang diuji secara simultan pada variabel yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang skripsi ini, penulis menyusun penelitian ini menjadi lima bab yang rinciannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, terdiri dari kajian pustaka perbankan syariah dan pembiayaan syariah, tahapan mekanisme kebijakan moneter Islam, sektor konsumsi, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, *sampling* dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, meliputi analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada.

BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.